

INTEGRASI SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Intan Rakhmawati^{1*}

¹S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*Corresponding Author Email: intanrakhmawati@unram.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah desa merupakan satuan kerja yang berada di bawah 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oleh karena kinerjanya dinilai oleh 3 kementerian, maka penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi sistem pengelolaan keuangan desa yang terkait dengan pembangunan desa dari 3 kementerian tersebut, apakah sudah koheren untuk penilaian kinerja pemerintah desa. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian interpretatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat mengenai sistem dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Capaian Dana Desa dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) baru terintegrasi pada Tahun 2020 dengan sistem Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) dalam Siskeudes. Sementara Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kemendagri dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari penilaian Kemendes PDPT, belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pengelolaan keuangan desa OM-SPAN.

Keyword: Integrasi Sistem Aplikasi, Pengelolaan Keuangan Desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan satuan kerja yang berada di bawah 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDPT). Selain Dana Desa, terdapat pula Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten, dan Pendapatan Asli Desa, dari pengelolaan potensi desa. Oleh karena cukup banyaknya jenis dana yang diperoleh desa, pengelolaan keuangan desa merupakan topik yang kini banyak disoroti. Selain itu, capaian pembangunan dan capaian keuangan juga menjadi pengukur kinerja desa. Pengukuran kinerja desa ini selanjutnya menghasilkan peringkat desa.

Permasalahannya adalah pengukuran kinerja desa ini menggunakan indikator yang beragam dari Kemendagri dan Kemendes PDPT, padahal kesemuanya harus terintegrasi dengan kinerja Kementerian Keuangan, sebagai kementerian yang menyalurkan Dana Desa. Pengukuran kinerja inilah yang menghasilkan kategori klasifikasi desa, yang bisa dianalogikan seperti peringkat desa, seperti yang telah dijelaskan di atas. Tolok ukur pengukuran kinerja dan capaian ini juga menjadi penentu untuk Dana Desa yang diberikan selanjutnya.

Berdasarkan pengukuran predikat kinerja, dikenal beberapa istilah klasifikasi desa. Berdasarkan Kemendes PDPT, ada istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini merupakan indeks komposit, yang dibentuk dari perhitungan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, berdasarkan Permendes PDPT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Dari pengukuran ini, dikenal klasifikasi Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Di lain pihak, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengeluarkan Profil Desa dan Kelurahan (selanjutnya disingkat Prodeskel), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Peraturan ini menghasilkan aplikasi Prodeskel, yang berisi pendataan sumber daya yang ada di desa, baik sumber daya alam,

sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi, dengan tujuan untuk membentuk profil desa ataupun kelurahan. Peraturan pendataan ini. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 peraturan tersebut, evaluasi keberhasilan pembangunan setiap tahun di desa menjadikan peringkat klasifikasi desa menjadi Kategori Cepat Berkembang, Kategori Berkembang, Kategori Lambat Berkembang, dan Kategori Kurang Berkembang.

Permasalahannya, Dana Desa yang diberikan dari pusat, dikendalikan oleh Kementerian Keuangan. Terkait Dana Desa ini, Kemendes PDTT membuat juga aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe), yang menilai capaian Dana Desa setiap tahun. Dengan demikian, menurut peneliti, semua aplikasi ini seharusnya juga terintegrasi dengan Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) dari Kementerian Keuangan.

Salah satu aplikasi yang menggunakan OM-SPAN adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Siskeudes), dari Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi sistem pengelolaan dan pembangunan keuangan desa (dengan aplikasi yang telah dijelaskan di atas), dengan Siskeudes, guna penilaian kinerja pemerintah desa. Arah penilaian kerjanya terutama dalam hal pengelolaan keuangan (termasuk di dalamnya perencanaan dan penganggaran desa).

2. METODE

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian interpretatif, karena didasarkan pada interpretasi peneliti atas sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa. Objek penelitian ini adalah sistem dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa, yang terdiri atas sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), sistem Indeks Desa Membangun (IDM), sistem dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe), yang dianalisis integrasinya dengan Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Interpretasi dilakukan peneliti atas hasil dokumentasi sistem dan wawancara dengan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat. Sementara analisis atas integrasi sistem dilakukan dengan menginterpretasikan apakah sistem sudah terintegrasi atau belum, berdasarkan menu dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem terkait aplikasi pengelolaan keuangan desa yang digunakan oleh pemerintah desa meliputi Profil Desa dan Kelurahan (selanjutnya disingkat Prodeskel), sistem Indeks Desa Membangun (IDM), sistem dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (selanjutnya disingkat SiPeDe), dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

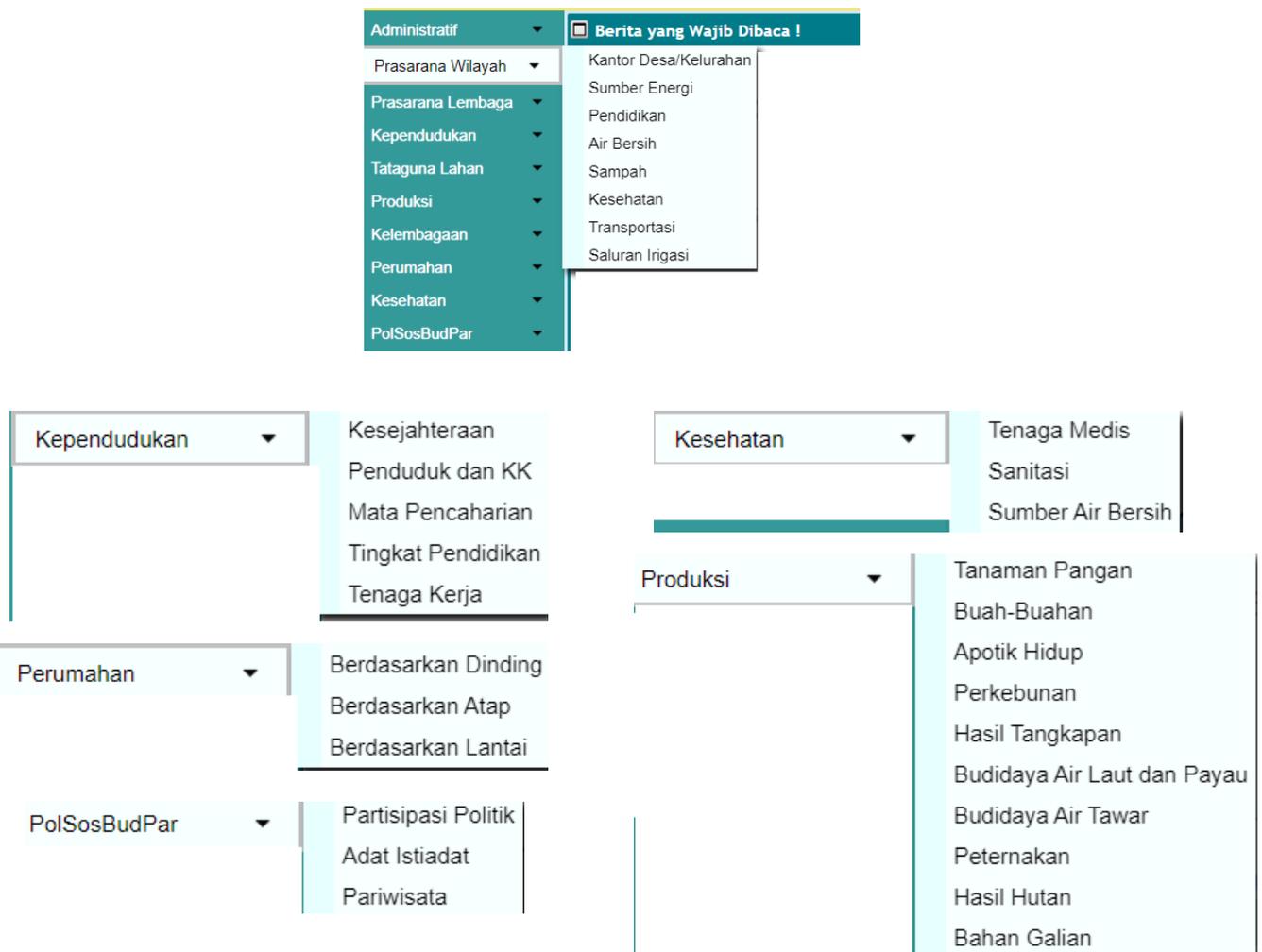
Aplikasi Prodeskel merupakan aplikasi yang dibangun Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, untuk menghimpun Sistem Informasi Desa dan Kelurahan, dengan tujuan pemetaan sarana, prasarana, dan sumber daya di desa. Pemetaan untuk profil ini didasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007.

Klasifikasi desa berdasarkan pemetaan profil ini menjadi Kategori Cepat Berkembang, Kategori Berkembang, Kategori Lambat Berkembang, dan Kategori Kurang Berkembang. Selain klasifikasi tersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 18, terdapat pula klasifikasi desa menjadi swasembada, swakarya, dan swadaya. Klasifikasi ini didasarkan pada laju perkembangan desa setiap 5 tahun. Berikut tampilan menu dalam Prodeskel:



Gambar 1. Tampilan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Administratif

Untuk menghimpun data profil dari sisi administratif desa, tampilan di atas merupakan tampilan menu yang harus diisi. Selanjutnya, berikut tampilan menu sumber daya sebagai prasarana wilayah yang harus diisi:

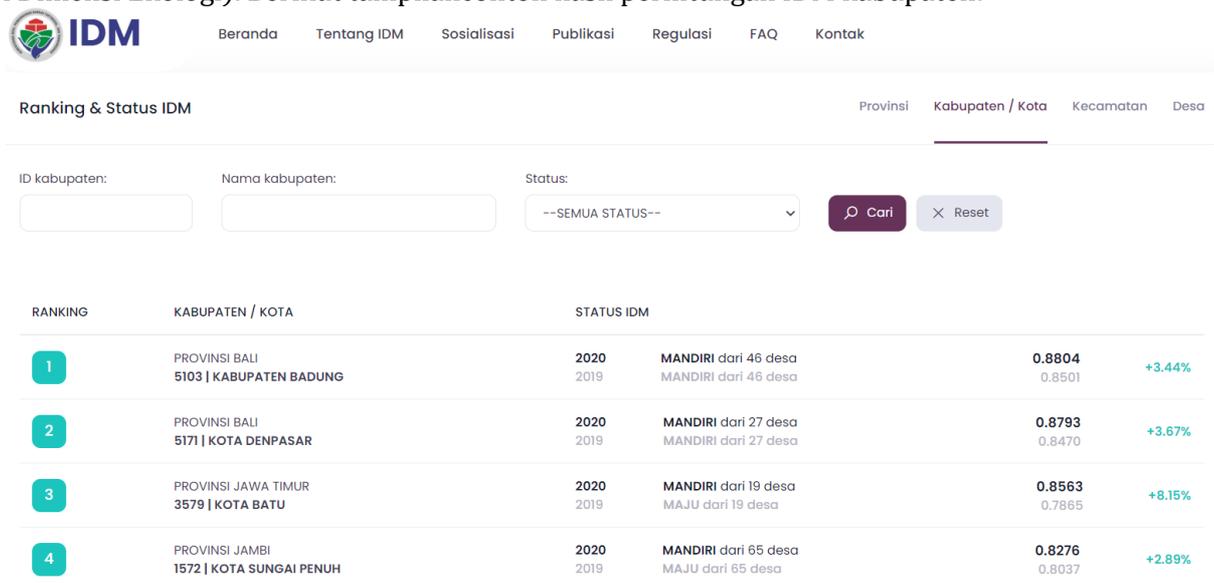


Gambar 2. Detail Isi Prodeskel

Kesemua data ini kemudian dihimpun menjadi Profil Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 42, kesemua data ini tidak hanya menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat, namun seharusnya menjadi data yang menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kebijakan di desa, termasuk dari segi keuangan desa. Sayangnya karena indikator yang digunakan untuk profil desa banyak, pengumpulan data

menjadi sulit juga, sehingga profil desa untuk keperluan integrasi dengan sistem keuangan menjadi cukup sulit disesuaikan, karena datanya yang sulit diperoleh, bahkan oleh pendamping desa. Selain itu, dalam sistem pun, sistem Prodeskel masih terpisah dengan OM-SPAN. Untuk pengumpulannya saja, data Prodeskel belum bisa menarik data dari kementerian maupun dinas lain, baik dari segi data pertanian maupun tanah dan perumahan (data dari Badan Pertanahan Nasional).

Di sisi lain, Kemendes PDTT mengeluarkan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. Indeks ini diperoleh dengan cara menggabungkan (komposit) atas beberapa dimensi sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa. Dasar perhitungan indeks ini adalah komposit dari 3 dimensi, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (dari Dimensi Sosial), Indeks Ketahanan Ekonomi (dari Dimensi Ekonomi), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (dari Dimensi Ekologi). Berikut tampilan contoh hasil perhitungan IDM kabupaten:



RANKING	KABUPATEN / KOTA	2020	2019	STATUS IDM	2020	2019	Perubahan
1	PROVINSI BALI 5103 KABUPATEN BADUNG	MANDIRI dari 46 desa	MANDIRI dari 46 desa	0.8804	0.8501	+3.44%	
2	PROVINSI BALI 5171 KOTA DENPASAR	MANDIRI dari 27 desa	MANDIRI dari 27 desa	0.8793	0.8470	+3.67%	
3	PROVINSI JAWA TIMUR 3579 KOTA BATU	MANDIRI dari 19 desa	MAJU dari 19 desa	0.8563	0.7865	+8.15%	
4	PROVINSI JAMBI 1572 KOTA SUNGAI PENUH	MANDIRI dari 65 desa	MAJU dari 65 desa	0.8276	0.8037	+2.89%	

Gambar 3. Indeks Desa Membangun Kemendes PDTT

Dimensi Sosial antara lain diperoleh dari penilaian atas ketersediaan sarana kesehatan maupun sarana pendidikan di desa. Sarana kesehatan antara lain dengan ketersediaan puskesmas dan poskesdes/polindes) dan kelengkapan konvergensi untuk pencegahan stunting. Sementara pada sarana pendidikan, diperoleh antara lain dari penilaian atas ketersediaan akses kependidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya akses informasi dan komunikasi atas bahan pendidikan. Keduanya juga harus terintegrasi dengan ketersediaan sarana pada bagian permukiman, antara lain akses air bersih dan air minum, akses listrik, akses informasi & komunikasi yang dijelaskan sebelumnya.

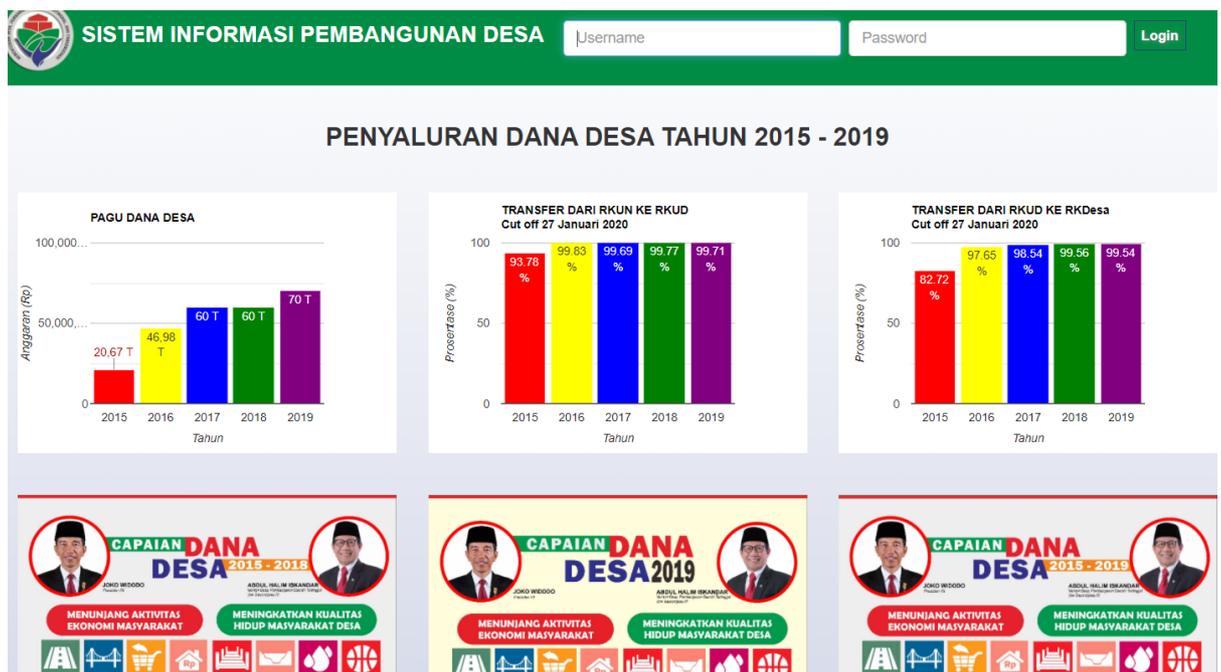
Untuk Dimensi Ekonomi, perhitungan indeks dari dimensi ini dilihat dari data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Untuk keterbukaan wilayah, terkait pula dengan tipologi desa. Terkait tipologi desa, ada pula Dimensi Ekologi, yang mencakup data kondisi lingkungan dan potensi bencana.

Akan halnya dari segi proses, data ini dikumpulkan tidak hanya oleh Perangkat Desa, namun juga oleh pendamping lokal desa. Data ini kemudian diverifikasi terlebih dahulu di tingkat kecamatan, dan selanjutnya, hasil verifikasi kecamatan diverifikasi lagi di tingkat kabupaten, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bappeda. Pada level teratas, Ditjen PPMD dan Pusdatin di Kemendes PDTT memvalidasi datanya kembali, dan menerbitkan SK Dirjen PPMD, untuk pembaruan status desa. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat, walaupun sistem ini belum terintegrasi, namun dari

segi perhitungan, sistem ini lebih sederhana daripada Prodeskel, karena indikator Prodeskel yang banyak dan beragam.

Berdasarkan analisis peneliti, Prodeskel dan IDM, belum saling terkait, karena masih menggunakan indikator yang berbeda. Perhitungan berbeda ini yang menjadikan sinergi untuk perencanaan program menjadi agak membingungkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Siskeudes, hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) juga seharusnya perlu terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran atas belanja desa dalam Siskeudes. Integrasi tersebut diperlukan agar Perangkat Desa dapat mengarahkan anggaran desa pada bidang yang perlu dibangun atau diperbaiki, sesuai kondisi fisik setiap dimensi. Anggaran ini akan tertuang dalam APBDes.

Terakhir adalah aplikasi SiPeDe yang menghimpun data Capaian Dana Desa dari Kemendes PDTT. Berikut tampilannya:



Gambar 4. Tampilan SiPeDe Kemendes PDTT

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat, Kementerian Desa PDTT menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi jumlah desa yang mencairkan Dana Desa, termasuk pencapaian kinerja (baik dari segi operasional maupun pembangunan) Dana Desa. Aplikasi ini juga didasarkan pada kinerja pengelolaan sumber daya dan keuangan desa, dan kesemuanya terintegrasi dengan OM-SPAN Kementerian Keuangan (termasuk dalam Siskeudes) tahun ini. Integrasi inilah pula yang menentukan persentase Dana Desa yang diberikan pada periode berikutnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi sistem pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Prodeskel, IDM, dan OM-SPAN Siskeudes. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Capaian Dana Desa dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) baru terintegrasi pada Tahun 2020 dengan sistem Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) dalam Siskeudes. Sementara Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dari Kemendagri dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari penilaian Kemendes PDTT, belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pengelolaan keuangan desa melalui OM-SPAN.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, terutama kepada Bapak Kabid Administrasi Pemerintahan Desa dan Ibu Kasi Administrasi Desa, atas semua waktu, informasi, data, serta penjelasan yang diberikan, terkait Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.

6. DAFTAR REFRENSI

- [1] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2016. *Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- [2] Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.